



Pengembangan Wisata Pantai Namasua di Negeri Naku Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon

Development of Namasua Beach Tourism in Naku Village, Leitimur Selatan District, Ambon City

Cornelia M Labery¹, Rafael Marthinus Osok^{2*},  Robert Berthy Riry¹ 

¹Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Pattimura

²Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

Article Info

Article history:

Received: 11-02-2026

Revised: 11-03-2026

Accepted: 27-03-2026

Published: 30-04-2026

ABSTRAK

Dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan di wilayah kepulauan, integrasi antara potensi ekologis dan partisipasi masyarakat lokal menjadi prasyarat utama terciptanya destinasi wisata yang berdaya saing. Kajian ini bertujuan menganalisis potensi, tantangan, dan merumuskan model konseptual pengembangan wisata Pantai Namasua berbasis pemberdayaan masyarakat di Negeri Naku, Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan 30 responden dari unsur masyarakat, wisatawan, dan pemerintah negeri. Data dianalisis menggunakan skala Likert dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman destinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Namasua memiliki potensi tinggi pada aspek keindahan lanskap dan kebersihan lingkungan, namun terkendala oleh minimnya fasilitas dasar, kelembagaan pengelola, serta promosi digital. Partisipasi masyarakat telah terbentuk, tetapi belum terstruktur dalam model tata kelola berbasis komunitas. Model konseptual yang dihasilkan menekankan sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha dan komunitas.

Kata kunci: Pengembangan Pariwisata; Partisipasi Masyarakat; Pariwisata Pesisir

ABSTRACT

In the context of sustainable tourism development in island regions, integrating ecological potential with local community participation is essential to creating competitive coastal destinations. This study aims to analyze the potential, challenges, and formulate a conceptual model for community-based tourism development at Namasua Beach, Naku Village, Ambon City. Employing a descriptive qualitative approach, data were obtained through field observations, in-depth interviews, and documentation involving 30 participants representing local residents, visitors, and local government. The data were analyzed using Likert scaling and SWOT analysis to identify the destination's strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The findings reveal that Namasua Beach possesses strong natural appeal and high environmental quality but faces constraints in basic infrastructure, institutional management, and digital promotion. Community participation has emerged but remains unstructured within a formal governance framework. The proposed conceptual model highlights a pentahelix collaboration among government, academia, businesses and communities.

Keywords: Tourism Development; Community Participation; Coastal Tourism



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

*Corresponding Author:

Rafael Marthinus Osok

Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

Jl. Ir. M. Putuhena Poka Ambon

E-mail: rafael.geo@gmail.com

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0003-9789-6957>

Panduan Sitasi:

Labery, C. M., Osok, R. M., & Riry, R. B. (2026). Pengembangan Wisata Pantai Namasua di Negeri Naku Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. *JENDELA PENGETAHUAN*, 19(1), 47-62. <https://doi.org/10.30598/jp19iss1pp47-62>

PENDAHULUAN

Pariwisata pesisir menjadi salah satu sektor strategis yang mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir, terutama sebagai respon terhadap meningkatnya preferensi wisatawan terhadap destinasi bernuansa alam, kesehatan mental, dan pengalaman *eco-friendly*. Laporan UNWTO (2023) menunjukkan bahwa tren wisata alam dan bahari meningkat 35% pasca-pandemi dan diproyeksikan terus bertumbuh seiring perubahan orientasi wisata global menuju keberlanjutan. Fenomena tersebut turut mempengaruhi arah kebijakan pariwisata berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengoptimalkan keunggulan wilayah pesisir melalui pendekatan *sustainable coastal tourism* yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, sosial-budaya, dan tata kelola partisipatif. Lebih jauh, transformasi pariwisata global kini menuntut destinasi tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman otentik berbasis budaya lokal, pelestarian lingkungan, dan nilai kemasyarakatan.

Konteks Indonesia semakin memperkuat urgensi tersebut mengingat 62% wilayah Indonesia merupakan perairan dan negara ini memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km, terpanjang kedua di dunia (BPS, 2024). Potensi tersebut berimplikasi pada posisi strategis sektor pariwisata bahari sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Data Kemenparekraf (2024) mencatat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB meningkat menjadi 3,80% dengan target 5% pada tahun 2025, serta menyerap 22,89 juta tenaga kerja. Selain itu, kebijakan nasional melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS) dan Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 menegaskan pengembangan destinasi wisata harus berbasis keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta memperhatikan kearifan lokal. Selaras dengan itu, pemerintah Kota Ambon menetapkan penguatan sektor pariwisata bahari sebagai salah satu prioritas pembangunan, termasuk destinasi-destinasi baru di Kecamatan Leitimur Selatan.

Dalam konteks regional Maluku, potensi wisata bahari telah menjadi ikon yang memperkuat identitas kawasan sebagai “laboratorium laut dunia”. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Maluku memiliki modal ekologis dan budaya yang sangat potensial untuk pengembangan *eco-tourism* dan *community-based tourism* (Wattimena, 2021; Matakena, 2022). Namun, temuan akademik lainnya justru mengungkap kesenjangan antara potensi dan realisasi pengelolaan destinasi, terutama terkait rendahnya kualitas infrastruktur, minimnya promosi digital, serta keterlibatan masyarakat yang belum optimal (Woisiri, 2020; Silvester, 2023). Kondisi serupa terlihat pada sejumlah pantai di Kota Ambon yang belum terkelola secara profesional, sehingga manfaat ekonominya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat adat di negeri-negeri pesisir.

Pantai Namasua di Negeri Naku, Kecamatan Leitimur Selatan, merupakan salah satu destinasi bahari yang memiliki daya tarik lanskap pantai berbentuk teluk, pasir putih, panorama laut, serta suasana alami yang masih terjaga. Potensi tersebut menjadi modal awal bagi pengembangan destinasi unggulan berbasis *sustainable coastal tourism*. Namun, hasil observasi awal serta kajian empiris menunjukkan adanya tantangan krusial berupa keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya aksesibilitas informasi, promosi digital yang minim, dan belum adanya skema pengelolaan terpadu berbasis masyarakat (Labery, 2025). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kunjungan dan belum maksimalnya manfaat ekonomi bagi masyarakat Negeri Naku. Selain itu, peluang integrasi budaya lokal seperti tradisi adat, kuliner khas, dan kerajinan belum dikembangkan sebagai atraksi wisata bernilai tambah.

Kesenjangan tersebut diperkuat oleh temuan riset di Indonesia yang menyimpulkan bahwa sebagian besar destinasi pantai unggulan menghadapi kendala serupa, yaitu ketidaksiapan kelembagaan masyarakat, belum adanya model tata kelola partisipatif, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan (Makatita, 2022; Laitupa, 2023). Padahal, pengembangan destinasi berbasis masyarakat terbukti mampu meningkatkan pendapatan lokal hingga 40% dan memperkuat keberlanjutan ekologi melalui kepemilikan sosial atas sumber daya alam (Hattu, 2020; Watuguly, 2024). Dengan demikian, terdapat gap teoretis dan empiris

yang menuntut kajian mendalam dan solusi pengembangan berbasis model konseptual yang dapat diaplikasikan.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademik, tetapi juga pada kontribusi praktis bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur pengembangan wisata pantai di Indonesia bagian timur dengan memasukkan perspektif kearifan lokal, modal sosial masyarakat adat, dan pendekatan *community-based tourism*. Secara praktis, kajian ini berpotensi menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan destinasi, strategi promosi digital, serta model pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM berbasis wisata bahari. Selain itu, hasil penelitian ini juga selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs 8, 11, 14) yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pelestarian lingkungan pesisir, dan penguatan budaya lokal.

Di sisi lain, pengembangan wisata tidak cukup hanya mengidentifikasi potensi dan hambatan, tetapi memerlukan desain model pengembangan yang komprehensif. Model konseptual tersebut harus memadukan modal ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan tata kelola *pentahelix* (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media) agar destinasi dapat tumbuh berkelanjutan. Integrasi pendekatan partisipatif menjadi kebutuhan strategis untuk membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat Negeri Naku terhadap Pantai Namasua sebagai ruang hidup budaya dan sumber ekonomi lokal.

Berangkat dari realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, kendala, dan merumuskan strategi pengembangan wisata Pantai Namasua yang aplikatif serta berbasis pemberdayaan masyarakat. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penyusunan Model Konseptual Pengembangan Wisata Pantai Namasua berbasis partisipasi masyarakat lokal yang mengintegrasikan nilai budaya Maluku, pendekatan *sustainable tourism*, dan kolaborasi *pentahelix*. Model ini diharapkan mampu menjadi referensi empiris dan teoritis dalam pengembangan destinasi wisata pantai skala lokal hingga nasional.

Sebagai penegasan kontribusi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas kajian pengembangan pariwisata pesisir berbasis masyarakat dalam konteks Negeri adat di Maluku melalui penyusunan model konseptual yang dapat diimplementasikan dan direplikasi pada destinasi serupa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif dengan tujuan menggambarkan potensi, tantangan, dan strategi pengembangan wisata Pantai Namasua secara sistematis berdasarkan fakta lapangan. Penelitian deskriptif dipilih agar temuan dapat disajikan dalam bentuk narasi, angka, serta interpretasi yang mencerminkan kondisi objektif lokasi penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara apa adanya melalui pengukuran variabel, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang logis berdasarkan indikator terukur (Sugiyono, 2016). Model ini sejalan dengan kebutuhan penelitian wisata daerah pesisir yang memerlukan pemetaan potensi alam, budaya lokal, dan kendala pengelolaan sebelum menyusun rekomendasi intervensi pengembangan destinasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Namasua yang berada di Negeri Naku, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan jangka waktu pelaksanaan selama satu bulan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki potensi wisata bahari yang cukup menjanjikan dan sedang dalam tahap pengembangan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Penentuan lokasi juga dilandasi oleh dukungan masyarakat lokal terhadap kegiatan penelitian, aksesibilitas lokasi bagi peneliti, serta adanya keterlibatan pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, pemerintah negeri, pelaku usaha lokal, dan wisatawan yang berkunjung. Hal ini memungkinkan penelitian menggali data secara komprehensif dan representatif dari berbagai sudut pandang untuk memperkuat objektivitas hasil penelitian (Hiariey, 2024).

Populasi dalam penelitian ini mencakup masyarakat Negeri Naku, wisatawan yang mengunjungi Pantai Namasua, perangkat pemerintah negeri, dan pelaku usaha lokal yang terlibat dalam aktivitas wisata. Teknik penarikan sampel menggunakan pendekatan purposive sampling, yakni pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan mencakup frekuensi kunjungan wisatawan ke Pantai Namasua minimal dua kali dalam setahun, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas wisata, serta kapasitas informatif responden terhadap kondisi destinasi yang diteliti (Lalaun et al., 2023). Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 orang, terdiri atas 15 masyarakat Negeri Naku (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga) serta 15 wisatawan dari luar negeri tersebut.

Teknik pengumpulan data terdiri atas data primer dan data sekunder untuk memastikan keluasan dan kedalaman informasi. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara mendalam kepada responden terpilih, serta dokumentasi aktivitas wisata dan fasilitas destinasi. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan, laporan kebijakan pemerintah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi terkait pengembangan wisata di wilayah Negeri Naku dan Kota Ambon. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi fisik pantai, kebersihan lingkungan, aktivitas wisatawan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Sementara wawancara digunakan untuk mengkonfirmasi data lapangan, menggali persepsi responden, serta memetakan kebutuhan pengembangan strategi destinasi.

Teknik analisis data dilakukan melalui proses tabulasi menggunakan Microsoft Excel, transformasi data ke dalam bentuk tabel, serta interpretasi secara kualitatif. Analisis untuk tujuan pertama dan kedua menggunakan skala Likert tiga kategori, yaitu sangat tidak setuju (1), cukup setuju (2), dan setuju (3). Nilai yang diperoleh dihitung dalam bentuk rata-rata dan dikonversi ke persentase untuk menentukan kategori penilaian. Analisis untuk tujuan ketiga terkait strategi pengembangan menggunakan analisis SWOT dengan mengelompokkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berdasarkan hasil temuan penelitian. Kombinasi analisis kuantitatif sederhana dengan penjelasan kualitatif memungkinkan penyajian hasil yang informatif, objektif, dan memadai untuk perumusan strategi pengembangan wisata Pantai Namasua secara komprehensif melalui pemanfaatan potensi dan minimasi kendala yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Potensi Wisata Pantai Namasua

Kondisi eksisting Pantai Namasua menunjukkan adanya kekuatan daya tarik wisata bahari yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi unggulan berbasis alam dan budaya lokal. Dalam konteks ini, hasil penelitian mengemukakan bahwa karakteristik alamiah kawasan pesisir, kualitas panorama, serta keunikan lansekap geomorfologis merupakan fondasi dasar pembentukan citra destinasi wisata. Keunggulan tersebut apabila dioptimalkan secara terencana dapat mendorong terciptanya daya saing destinasi, baik pada level regional Pulau Ambon maupun dalam jejaring pariwisata Maluku. Secara empirik, persepsi masyarakat dan pengunjung mengarah pada penilaian positif terhadap aspek bentang alam, estetika lingkungan, serta atmosfer ketenangan yang ditawarkan oleh Pantai Namasua sebagai ruang rekreasi. Keberadaan elemen ekologis yang relatif masih alami menjadi komponen yang menempatkan Pantai Namasua memiliki nilai diferensiatif dibanding destinasi pantai lainnya.

Sejalan dengan prinsip pengembangan destinasi berbasis ekowisata, karakteristik alam yang masih terjaga pada Pantai Namasua dapat menjadi modal untuk penguatan positioning destinasi sebagai kawasan wisata berbasis konservasi. Hal tersebut tercermin dari tanggapan para pengunjung dan masyarakat bahwa kualitas visual lingkungan pesisir, kondisi kebersihan, serta keaslian karakter pantai menjadi faktor yang mendorong minat kunjungan. Selain itu, potensi wisata bahari yang berorientasi pada pengalaman langsung (*experiential tourism*) seperti eksplorasi pesisir, swafoto, relaksasi, dan aktivitas air ringan berpeluang dikembangkan

sebagai portofolio atraksi wisata. Potensi tersebut menjadi semakin strategis mengingat adanya tren wisata alam yang semakin diminati pascapandemi, dimana preferensi wisatawan bergeser pada pengalaman berbasis alam, ketenangan, dan eksplorasi keindahan lingkungan.

Lebih jauh, potensi wisata Pantai Namasua tidak hanya ditinjau dari aspek biofisik semata, tetapi juga dari kemungkinan integrasi budaya dan kearifan lokal sebagai penguat identitas destinasi. Konteks lokalitas Negeri Naku yang kaya dengan tradisi, narasi sejarah, dan kearifan budaya membuka peluang pengembangan atraksi berbasis budaya (*cultural attachment*), kuliner khas, serta seni pertunjukan tradisional sebagai *supporting attraction* destinasi. Meskipun unsur budaya belum dikelola secara optimal di kawasan pantai, namun kapasitas tersebut berada pada posisi yang dapat dikembangkan dalam kerangka *destination value chain* apabila tersusun dalam perencanaan yang sistematis. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan bahwa Pantai Namasua memiliki modal yang kuat untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis alam dan budaya yang berdaya saing, apabila potensi alam, budaya, dan pengalaman wisata dapat dikemas secara terpadu.

Gambaran kecenderungan persepsi mengenai potensi wisata Pantai Namasua dapat dilihat melalui indikator penilaian yang telah dikonstruksi berdasarkan parameter kualitas panorama, kebersihan lingkungan, keunikan geografis, dan daya tarik destinasi. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai aspek-aspek tersebut, berikut disajikan hasil tabulasi yang menggambarkan kecenderungan penilaian terkait potensi wisata Pantai Namasua sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Potensi Alam Pantai Namasua

No	Indikator Potensi Alam	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Keindahan panorama pesisir (pantai, laut, ombak)	2,78	Sangat Tinggi
2	Kebersihan lingkungan pantai	2,62	Tinggi
3	Keunikan lansekap dan geomorfologi pantai	2,85	Sangat Tinggi
4	Kondisi vegetasi dan ekosistem pesisir	2,57	Tinggi
5	Suasana tenang dan kenyamanan lingkungan	2,73	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah, 2025 (kombinasi data primer & penguatan)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa keseluruhan indikator potensi alam menunjukkan skor yang tinggi hingga sangat tinggi. Keunikan lansekap dan geomorfologi pantai memperoleh skor tertinggi dengan nilai rata-rata 2,85 yang mengindikasikan bahwa keberadaan bentuk fisik pantai, konfigurasi garis pantai, struktur batuan pesisir, serta elemen visual alami memiliki daya pikat yang kuat dalam membangun *sense of place* destinasi. Hal ini menunjukkan bahwa elemen lanskap bukan hanya menjadi objek visual, melainkan menjadi pengalaman ruang yang dinilai bernilai bagi pengunjung. Di sisi lain, keindahan panorama pesisir juga mencatat skor rata-rata yang sangat tinggi, yakni 2,78, yang mempertegas bahwa citra visual pantai merupakan modal dasar untuk menciptakan *image branding* destinasi Pantai Namasua.

Dari tabel yang sama tampak bahwa aspek kebersihan lingkungan serta kondisi vegetasi pesisir memperoleh kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun aspek kebersihan pantai dan ekosistem vegetasi dinilai positif, namun kedua komponen tersebut memerlukan penguatan dalam konteks pengelolaan keberlanjutan (*sustainable coastal management*). Keberlanjutan kualitas kebersihan dan ekosistem membutuhkan intervensi pengelolaan berbasis masyarakat serta penataan ruang wisata agar keberlanjutan daya tarik lingkungan tetap terjaga. Adapun suasana tenang dan kenyamanan pantai yang memperoleh skor sangat tinggi (2,73) menjadi aspek yang memperkuat diferensiasi destinasi, terutama dalam konteks wisata *healing* dan *slow tourism*.

Pada tabel berikutnya akan ditampilkan data mengenai aspek potensi budaya dan kearifan lokal sebagai elemen pendukung pengembangan destinasi pariwisata Pantai Namasua. Adapun kecenderungan persepsi terhadap aspek budaya tersebut dapat diamati sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Potensi Budaya dan Kearifan Lokal dalam Pengembangan Wisata

No	Indikator Potensi Budaya & Kearifan Lokal	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Ketersediaan seni tradisional sebagai atraksi wisata	1,92	Rendah
2	Kuliner lokal khas Negeri Naku yang berpotensi dikembangkan	2,24	Cukup Tinggi
3	Kerajinan tangan lokal sebagai produk wisata	1,87	Rendah
4	Nilai kearifan lokal untuk konsep wisata berbasis budaya	2,31	Cukup Tinggi
5	Potensi narasi sejarah dan tradisi lokal untuk <i>storytelling</i> destinasi	2,18	Cukup Tinggi

Sumber: Data diolah, 2025 (kombinasi data primer & penguatan)

Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa aspek potensi budaya dan kearifan lokal belum menempati posisi yang optimal sebagai daya tarik wisata. Indikator ketersediaan seni tradisional dan kerajinan tangan masih berada pada kategori rendah, mencerminkan bahwa elemen budaya belum dikelola sebagai atraksi wisata yang dapat memberikan nilai tambah. Hal ini dapat menjadi perhatian strategis karena dalam konsep pariwisata berkelanjutan, budaya dan kearifan lokal merupakan komponen penting dalam membentuk identitas destinasi. Sementara itu, kuliner lokal, nilai kearifan lokal, dan narasi sejarah memperoleh kategori cukup tinggi, yang berarti ketiga aspek ini menyimpan peluang untuk dikembangkan sebagai *cultural experience* wisata. Dengan demikian, aspek budaya dapat diarahkan pada strategi *destination interpretation* melalui narasi, kuliner, dan pengalaman budaya.

2. Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Pendukung Wisata

Ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana wisata merupakan elemen fundamental dalam menentukan mutu pengalaman berwisata serta daya tarik suatu destinasi untuk dapat dikunjungi secara berkelanjutan. Pantai Namasua, sebagai destinasi yang memiliki daya tarik alam yang kuat, memerlukan dukungan infrastruktur wisata yang memadai agar nilai kunjungan yang tercipta tidak berhenti pada bentuk apresiasi visual semata, tetapi mampu berkembang menjadi aktivitas wisata yang beragam dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas dasar di kawasan Pantai Namasua masih berada pada tahap awal, sehingga perlu dilakukan intervensi peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung agar sesuai dengan standar pelayanan wisata pada umumnya. Dengan demikian, pemenuhan sarana prasarana dianggap sebagai salah satu titik kritis dalam upaya pengembangan destinasi yang berdaya saing.

Keberadaan fasilitas fisik wisata sangat menentukan durasi tinggal wisatawan, pola belanja wisata, dan tingkat kenyamanan selama berada di lokasi. Fasilitas dasar seperti toilet, area parkir, tempat berteduh, gazebo, kios kuliner, dan tempat informasi wisata merupakan komponen minimal yang diharapkan tersedia bagi wisatawan. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas dasar belum tersedia secara memadai di Pantai Namasua sehingga berdampak pada keterbatasan aktivitas wisata yang dapat dilakukan di lokasi. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya tingkat pembelanjaan wisatawan (*tourist spending*), singkatnya durasi kunjungan (*length of stay*), serta terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dihasilkan oleh masyarakat lokal melalui aktivitas jasa dan perdagangan wisata. Untuk itu, peningkatan fasilitas fisik harus menjadi prioritas kebijakan pembangunan wisata Pantai Namasua.

Dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan, penyediaan fasilitas dan prasarana tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, namun harus memperhatikan kesesuaian dengan daya dukung lingkungan pesisir. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas wisata Pantai Namasua harus didasarkan pada prinsip ramah lingkungan,

menghindari kerusakan ekosistem, serta memperhatikan estetika lanskap pantai. Integrasi konsep infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dan fasilitas berbasis kearifan lokal dapat menjadi pendekatan tepat agar pengembangan fasilitas tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Temuan berikut akan memberikan gambaran mengenai persepsi dan penilaian terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendukung wisata Pantai Namasua. Untuk memberikan visualisasi empiris, data tersebut disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Ketersediaan Fasilitas dan Sarana Dasar Wisata Pantai Namasua

No	Jenis Fasilitas Dasar	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Toilet dan sanitasi ramah lingkungan	1,68	Sangat Rendah
2	Tempat berteduh dan gazebo	1,74	Rendah
3	Area parkir yang memadai	2,12	Cukup
4	Tempat sampah dan pengelolaan kebersihan	2,27	Cukup
5	Jalur akses pejalan kaki (tracking)	1,83	Rendah

Sumber: Data diolah, 2025 (kombinasi data primer & penguatan)

Berdasarkan Tabel 3, tampak bahwa fasilitas dasar yang menjadi kebutuhan mendesak bagi wisatawan masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Komponen fasilitas sanitasi berada pada skor rata-rata 1,68 yang menunjukkan ketersediaannya sangat minim. Kondisi ini menghambat kenyamanan wisatawan, terutama bagi pengunjung keluarga dan wisatawan yang melakukan aktivitas di pantai dalam durasi lebih panjang. Begitu pula fasilitas tempat berteduh dan gazebo masih berada pada kategori rendah (1,74), yang mengindikasikan minimnya ruang publik untuk beristirahat atau menikmati pemandangan pantai dengan lebih nyaman. Sementara itu, area parkir dan ketersediaan tempat sampah berada pada kategori cukup, yang berarti terdapat fasilitas dasar namun perlu penataan dan perbaikan agar lebih layak.

Dari data tersebut terlihat bahwa infrastruktur penunjang aktivitas wisata seperti jalur pejalan kaki (tracking) yang memadai masih sangat minim. Padahal, jalur pedestrian alami di pesisir merupakan elemen penting dalam meningkatkan keamanan pengunjung dan memberikan pengalaman wisata yang terstruktur. Minimnya fasilitas dasar ini berpotensi menurunkan minat kunjungan berulang dan dapat mengurangi daya saing Pantai Namasua dibandingkan dengan destinasi pantai lain di Pulau Ambon yang telah memiliki fasilitas lebih lengkap. Hal ini menegaskan pentingnya perhatian serius dalam pengembangan dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur sebagai bagian dari *visitor management system*.

Sejalan dengan pentingnya fasilitas dasar, aspek ketersediaan prasarana pendukung seperti kios kuliner, layanan transportasi lokal, dan informasi wisata juga merupakan elemen penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkesan. Temuan mengenai kondisi prasarana pendukung tersebut ditunjukkan sebagaimana terlihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Ketersediaan Prasarana Pendukung Wisata di Pantai Namasua

No	Jenis Prasarana Pendukung	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Kios kuliner dan UMKM lokal	1,95	Rendah
2	Papan informasi dan penunjuk arah wisata	1,72	Rendah
3	Penyewaan perlengkapan wisata (ban renang, snorkel, dll.)	1,53	Sangat Rendah
4	Layanan transportasi lokal menuju pantai	2,08	Cukup
5	Unit keamanan dan pertolongan pertama (lifeguard)	1,47	Sangat Rendah

Sumber: Data diolah, 2025 (kombinasi data primer & penguatan)

Dari Tabel 4, terlihat bahwa prasarana pendukung wisata masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah, terutama pada aspek penyewaan perlengkapan wisata dan ketersediaan petugas penjaga pantai/lifeguard. Minimnya penyewaan perlengkapan wisata mencerminkan bahwa aktivitas wisata bahari belum terkelola secara ekonomis oleh masyarakat, sehingga potensi peningkatan ekonomi lokal belum dimanfaatkan optimal. Di sisi lain, layanan transportasi lokal menuju pantai mendapat kategori cukup yang menandakan akses mobilitas masih tersedia, namun memerlukan peningkatan untuk kenyamanan dan keteraturan layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan prasarana pendukung masih berada pada tahap awal dan memerlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat lokal.

Transisi berikutnya akan mengarahkan pada uraian Sub-Sub Bab A.3 yang mengkaji Aksesibilitas dan Konektivitas Wisata yang menjadi salah satu faktor penentu kemudahan bagi wisatawan untuk menjangkau dan menikmati Pantai Namasua.

3. Aksesibilitas dan Konektivitas Wisata

Aksesibilitas merupakan determinan penting dalam mengukur tingkat kemudahan wisatawan mencapai suatu destinasi. Tingkat keterjangkauan lokasi wisata akan sangat mempengaruhi keputusan kunjungan, frekuensi kunjungan, serta persepsi terhadap nilai destinasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas menuju Pantai Namasua telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun belum mencapai standar ideal destinasi wisata unggulan. Secara umum, akses jalan menuju lokasi sudah dapat dilalui dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, namun masih terdapat beberapa bagian jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas dan penataan. Kondisi aksesibilitas yang cukup baik ini memberikan peluang bagi Pantai Namasua untuk lebih mudah dipromosikan, terutama bagi wisatawan lokal di Pulau Ambon yang cenderung lebih selektif dalam memilih destinasi wisata dengan pertimbangan kemudahan transportasi.

Kemudahan konektivitas menuju lokasi wisata tidak hanya ditentukan oleh kualitas jalan, tetapi juga oleh ketersediaan moda transportasi, petunjuk arah (*wayfinding system*), dan informasi mobilitas wisata. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun transportasi menuju Pantai Namasua dapat diakses, namun frekuensi dan ketersediaannya belum terorganisir secara sistematis sebagai layanan wisata. Ketidakpastian moda transportasi, minimnya papan penunjuk arah, serta kurangnya promosi rute wisata menjadi hambatan yang berdampak pada keterbatasan aksesibilitas bagi wisatawan luar daerah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kunjungan wisatawan non-lokal, karena destinasi yang tidak terinformasi dengan baik cenderung tidak menjadi pilihan prioritas wisatawan. Dengan demikian, penyediaan sistem informasi perjalanan merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas destinasi.

Dalam konteks pengembangan destinasi berkelanjutan, konektivitas wisata menjadi aspek penting dalam meningkatkan nilai pengalaman perjalanan pengunjung. Pengelolaan aksesibilitas yang baik dapat menciptakan persepsi perjalanan yang aman, nyaman, dan efisien. Selain itu, konektivitas juga mencerminkan keterhubungan destinasi dengan daya tarik lain di sekitarnya, sehingga integrasi dengan rute wisata terdekat dapat meningkatkan daya saing Pantai Namasua. Oleh karena itu, penyediaan akses yang terjangkau dan terintegrasi dapat menjadi pendorong bagi terbentuknya *tourism movement pattern* yang berkelanjutan. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai tingkat aksesibilitas Pantai Namasua, data mengenai indikator aksesibilitas disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Penilaian Aksesibilitas Menuju Pantai Namasua

No	Indikator Aksesibilitas	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Kondisi jalan menuju lokasi	2,47	Cukup Baik
2	Kemudahan penggunaan kendaraan pribadi	2,68	Baik
3	Ketersediaan transportasi umum	1,89	Rendah

4	Ketersediaan petunjuk arah yang jelas	1,73	Rendah
5	Waktu tempuh menuju lokasi	2,58	Baik

Sumber: Data diolah, 2025 (kombinasi data primer & penguatan)

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa indikator kemudahan penggunaan kendaraan pribadi memperoleh kategori baik dengan skor 2,68, menunjukkan bahwa akses menuju Pantai Namasua lebih banyak mengandalkan kendaraan pribadi atau sewaan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa destinasi ini masih kurang inklusif bagi wisatawan dengan keterbatasan moda transportasi. Kondisi jalan yang berada pada kategori cukup baik dengan skor 2,47 menunjukkan masih perlunya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur, terutama pada segmen jalan yang rusak atau berbatu yang dapat mengganggu kenyamanan perjalanan. Adapun waktu tempuh yang berada pada kategori baik (2,58) menunjukkan bahwa Pantai Namasua relatif mudah dijangkau dalam durasi wajar dari pusat kota, sehingga memberikan nilai positif bagi wisatawan yang mencari destinasi wisata harian (*one-day trip*).

Sementara itu, indikator ketersediaan transportasi umum dan petunjuk arah mendapatkan kategori rendah. Minimnya transportasi umum menuju lokasi wisata dengan skor 1,89 menunjukkan bahwa Pantai Namasua belum terintegrasi dalam jaringan transportasi wisata Pulau Ambon. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan bagi wisatawan luar daerah atau wisatawan muda yang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, skor rendah pada ketersediaan petunjuk arah (1,73) memperlihatkan kurangnya sistem informasi wisata yang seharusnya membantu navigasi pengunjung. Minimnya papan petunjuk arah juga berimplikasi pada pengalaman perjalanan yang kurang informatif, sehingga menurunkan persepsi kualitas destinasi.

Setelah menguraikan aksesibilitas dasar, penting pula untuk menilai konektivitas destinasi yang mencakup keterhubungan Pantai Namasua dengan fasilitas pendukung, desa sekitar, serta daya tarik wisata di sekitarnya. Rincian terkait konektivitas destinasi ditunjukkan sebagaimana terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Konektivitas Destinasi Wisata Pantai Namasua

No	Indikator Konektivitas Destinasi	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Keterhubungan dengan destinasi wisata terdekat	2,14	Cukup
2	Akses ke fasilitas umum (toko, klinik, atm)	1,92	Rendah
3	Ketersediaan jaringan komunikasi dan internet	2,21	Cukup
4	Akses menuju desa sekitar sebagai <i>supporting village</i>	2,32	Cukup Tinggi
5	Kemudahan integrasi dengan paket wisata lokal	1,78	Rendah

Sumber: Data diolah, 2025 (kombinasi data primer & penguatan)

Dari Tabel 6, terlihat bahwa konektivitas destinasi Pantai Namasua masih berada pada kategori cukup, dengan beberapa indikator yang memerlukan intervensi. Keterhubungan dengan desa sekitar sebagai *supporting village* menunjukkan skor cukup tinggi (2,32), menandakan adanya potensi kolaborasi antara masyarakat dan pengelola wisata dalam penyediaan jasa penunjang seperti kuliner lokal, homestay, dan kegiatan budaya. Sementara itu, keterhubungan dengan destinasi wisata terdekat berada pada kategori cukup, mengindikasikan peluang pengembangan paket wisata terpadu (*integrated tourism route*). Namun, ketersediaan fasilitas umum seperti toko, klinik, maupun ATM masih rendah (1,92), sehingga dapat menjadi kendala bagi wisatawan yang memerlukan layanan dasar selama perjalanan wisata.

Indikator kemudahan integrasi dengan paket wisata lokal berada pada kategori rendah (1,78) yang menandakan belum adanya pola pengemasan perjalanan yang menghubungkan Pantai Namasua dengan atraksi wisata lainnya di kawasan Leitimur Selatan. Padahal, integrasi paket wisata akan meningkatkan lama tinggal dan pola belanja wisatawan. Di sisi lain, jaringan komunikasi dan internet berada pada kategori cukup, menunjukkan adanya akses yang relatif

memadai namun perlu diperkuat, mengingat kebutuhan digital wisatawan saat ini cukup tinggi untuk dokumentasi perjalanan, navigasi, dan promosi spontan.

Setelah adanya pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi aksesibilitas dan konektivitas destinasi, bagian selanjutnya akan menguraikan Sub-Sub Bab A.4 yang memfokuskan pada aspek Pengelolaan dan Tata Kelola Destinasi Wisata, sebagai faktor internal penentu keberhasilan pengembangan.

4. Pengelolaan dan Tata Kelola Destinasi Wisata

Pengelolaan dan tata kelola destinasi wisata merupakan pilar utama yang menentukan keberhasilan pengembangan suatu kawasan wisata secara berkelanjutan. Tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan aspek manajerial dalam penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut koordinasi antar pemangku kepentingan, sistem pengelolaan lingkungan, serta model pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Pantai Namasua masih berada pada tahap awal pembentukan struktur pengelolaan yang ideal, dengan pola koordinasi belum berjalan optimal antara pemerintah desa, pemuda adat, kelompok masyarakat, dan pihak yang berpotensi menjadi mitra usaha. Kondisi ini berdampak pada lemahnya sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan wisata. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengelola yang kuat dan terstruktur merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat arah pengembangan Pantai Namasua.

Dalam konteks tata kelola destinasi, aspek kelembagaan menjadi fondasi penting untuk mengatur pembagian peran, kewenangan, dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Temuan memperlihatkan bahwa belum adanya lembaga pengelola yang formal dan terdokumentasi menyebabkan pengelolaan Pantai Namasua cenderung berjalan secara sporadis dan situasional. Ketidadaan dokumen rencana pengelolaan, standar pelayanan wisata, serta prosedur operasional destinasi berimplikasi pada tidak adanya arah pembangunan yang jelas dan keberlanjutan program. Di sisi lain, potensi partisipasi masyarakat sesungguhnya cukup kuat, namun belum terorganisasi dalam satu sistem kelembagaan yang terkelola. Hal ini menunjukkan perlunya pembentukan *community-based tourism management* yang berbasis partisipasi masyarakat untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan destinasi.

Pengelolaan destinasi yang berkelanjutan memerlukan prinsip sinergisitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki ruang keterlibatan dan rasa memiliki terhadap destinasi. Konsep *good tourism governance* menekankan bahwa pengelolaan wisata harus melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi secara kolaboratif untuk menciptakan nilai manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang seimbang. Temuan penelitian mencerminkan bahwa Pantai Namasua memiliki potensi besar untuk menerapkan tata kelola berbasis komunitas, namun kelemahan pada aspek kelembagaan, permodalan, dan perencanaan menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui intervensi strategis. Gambaran mengenai tingkat kesiapan dan tata kelola pengelolaan wisata Pantai Namasua dapat dilihat sebagaimana tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Indikator Tata Kelola dan Kelembagaan Pengelolaan Wisata

No	Indikator Tata Kelola Wisata	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Keberadaan lembaga pengelola yang jelas	1,63	Sangat Rendah
2	Pembagian peran dan tanggung jawab antar pihak	1,78	Rendah
3	Koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat	2,04	Cukup
4	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan wisata	1,52	Sangat Rendah
5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan	2,26	Cukup Tinggi

Sumber: Data diolah, 2025 (kombinasi data primer & penguatan)

Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa indikator kelembagaan pengelolaan wisata masih berada pada kategori sangat rendah, khususnya terkait keberadaan lembaga pengelola destinasi (1,63) dan ketersediaan dokumen perencanaan (1,52). Kondisi ini menunjukkan belum adanya struktur organisasi pengelola yang resmi, serta ketidaksiapan dokumentasi perencanaan yang menjadi pedoman tata kelola destinasi. Ketiadaan dokumen perencanaan menjadikan pengembangan wisata bergerak tanpa arah strategis yang jelas sehingga tidak dapat menjamin kesinambungan program jangka panjang. Pembagian peran antarpihak yang juga berada pada kategori rendah (1,78) menunjukkan bahwa fungsi koordinatif dan kolaboratif dalam pengelolaan belum berjalan optimal.

Namun demikian, terdapat indikasi positif pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang memperoleh kategori cukup tinggi (2,26). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keinginan dan kesiapan untuk terlibat dalam pengelolaan destinasi, namun memerlukan wadah dan sistem yang terorganisir. Dari indikator koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat yang berada pada kategori cukup (2,04), menunjukkan adanya potensi sinergi yang dapat diperkuat melalui forum komunikasi dan pembentukan unit pengelola yang formal, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, upaya pembentukan kelembagaan pengelola destinasi menjadi langkah strategis awal yang harus dilakukan untuk memperkuat tata kelola Pantai Namasua.

Selaras dengan aspek kelembagaan, pengelolaan destinasi juga memerlukan sistem manajemen operasional yang mengatur pelayanan wisata, pengelolaan lingkungan, keamanan, tiket masuk, dan pemeliharaan fasilitas. Temuan mengenai aspek manajemen operasional destinasi Pantai Namasua disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Manajemen Operasional Pengelolaan Wisata Pantai Namasua

No	Indikator Manajemen Operasional	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Sistem pelayanan dan informasi wisata	1,74	Rendah
2	Pengelolaan kebersihan dan lingkungan	2,18	Cukup
3	Mekanisme pemeliharaan fasilitas wisata	1,68	Sangat Rendah
4	Sistem keamanan dan keselamatan wisatawan	1,71	Rendah
5	Mekanisme evaluasi dan monitoring pengelolaan	1,59	Sangat Rendah

Sumber: Data diolah, 2025 (kombinasi data primer & penguatan)

Dari Tabel 8, tampak bahwa manajemen operasional destinasi juga masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah, terutama pada aspek pemeliharaan fasilitas (1,68) dan mekanisme evaluasi pengelolaan (1,59). Minimnya sistem pemeliharaan fasilitas menunjukkan tidak adanya standar operasional dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur wisata. Demikian juga pada sistem keamanan dan keselamatan wisatawan (1,71), skor rendah menandakan belum adanya prosedur keselamatan, petugas keamanan, maupun sarana pertolongan pertama. Indikator pengelolaan kebersihan dan lingkungan berada pada kategori cukup (2,18), menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai, tetapi memerlukan sistem yang lebih terstruktur agar konsistensi penjagaan lingkungan tetap terjaga.

Setelah memperoleh pemahaman tentang tata kelola dan pengelolaan destinasi, bagian berikutnya akan menguraikan Sub-Sub Bab A.5, yang memfokuskan pada Dampak dan Nilai Manfaat Pengembangan Wisata Pantai Namasua, sehingga memberikan pemahaman holistik tentang capaian awal dari proses pengembangan yang telah berjalan.

5. Dampak dan Nilai Manfaat Pengembangan Wisata Pantai Namasua

Pengembangan destinasi wisata senantiasa membawa dampak bagi wilayah dan masyarakat di sekitarnya, baik dalam dimensi ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan. Dampak yang muncul dapat bersifat positif apabila pengembangan wisata berjalan dengan perencanaan matang, tata kelola yang baik, serta mengedepankan keberlanjutan. Namun, tanpa strategi yang terarah, dampak negatif dapat timbul dan justru menimbulkan kerentanan

sosial, budaya, serta ekologis bagi komunitas lokal. Pada konteks Pantai Namasua, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengembangan wisata masih berada pada tahap awal, telah muncul sejumlah manfaat yang dirasakan masyarakat. Meskipun tingkat intensitasnya belum signifikan, tetapi memperlihatkan indikasi positif adanya potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan identitas lokal melalui aktivitas wisata berbasis alam dan budaya.

Secara ekonomi, keberadaan Pantai Namasua membuka peluang terbentuknya aktivitas ekonomi masyarakat melalui perdagangan kecil, jasa parkir, kuliner, serta potensi penyewaan perlengkapan wisata di masa mendatang. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun peluang ekonomi tersebut belum tergarap optimal, sudah terdapat persepsi bahwa wisata Pantai Namasua dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat Negeri Naku. Sejalan dengan bertambahnya jumlah kunjungan, aktivitas ekonomi masyarakat berpotensi meningkat dengan terbentuknya usaha-usaha baru seperti kios makanan, cendera mata, usaha jasa fotografer wisata, dan layanan transportasi. Pada dimensi sosial dan budaya, pengembangan wisata Pantai Namasua juga berpotensi memperkuat interaksi sosial, solidaritas komunitas, serta menjadi media pelestarian budaya jika diintegrasikan dengan nilai kearifan lokal. Namun demikian, muncul pula potensi risiko seperti komersialisasi budaya, perubahan gaya hidup, dan lunturnya nilai budaya jika tidak diatur dalam kerangka pengelolaan berbasis adat dan norma lokal.

Selain aspek ekonomi dan sosial budaya, dimensi lingkungan perlu dicermati sebagai dampak tak terpisahkan dari aktivitas wisata. Hasil temuan menunjukkan bahwa keberadaan wisata Pantai Namasua menghadirkan dua sisi bagi lingkungan pesisir. Pada sisi positif, terdapat peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pantai karena keberadaan wisata mendorong motivasi kolektif untuk menjaga estetika pantai. Namun pada sisi lain, potensi kerusakan lingkungan tetap menjadi ancaman, terutama jika aktivitas wisata meningkat tanpa pengaturan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Risiko pencemaran sampah, erosi pantai, serta kerusakan vegetasi pesisir dapat muncul apabila tidak terdapat regulasi yang mengatur aktivitas wisata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dampak wisata sejak dini sangat penting agar strategi pengembangan yang diterapkan dapat memaksimalkan manfaat, sekaligus meminimalkan risiko jangka panjang.

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai persepsi manfaat ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang mulai dirasakan dari aktivitas wisata Pantai Namasua, berikut disajikan kecenderungan penilaian sebagaimana terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Dampak dan Manfaat Sosial-Ekonomi Pengembangan Wisata Pantai Namasua

No	Indikator Manfaat Sosial-Ekonomi	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Peningkatan pendapatan masyarakat	2,11	Cukup
2	Peluang usaha bagi masyarakat lokal	2,24	Cukup Tinggi
3	Perluasan lapangan kerja baru	1,93	Rendah
4	Peningkatan interaksi sosial dan gotong royong	2,36	Tinggi
5	Penguatan identitas budaya dan kebanggaan daerah	2,42	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2025 (kombinasi data primer & penguatan)

Berdasarkan Tabel 9, dapat dilihat bahwa manfaat sosial ekonomi telah mulai dirasakan oleh masyarakat, meskipun masih pada skala yang terbatas. Indikator penguatan identitas budaya dan kebanggaan daerah memperoleh skor tertinggi (2,42), yang mengindikasikan bahwa keberadaan wisata turut menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap aset budaya lokal. Hal ini merupakan modal sosial penting dalam mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Peningkatan interaksi sosial dan gotong royong juga berada pada kategori tinggi (2,36), menunjukkan bahwa aktivitas persiapan, pemeliharaan, dan kegiatan wisata mendorong kerja kolektif komunitas. Namun, perluasan lapangan kerja masih berada pada

kategori rendah (1,93), menandakan bahwa sektor wisata belum menciptakan peluang kerja signifikan dan masih memerlukan pengembangan usaha penunjang.

Sementara itu, peluang usaha bagi masyarakat lokal berada pada kategori cukup tinggi (2,24) menunjukkan adanya potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan apabila wisata dikemas secara profesional. Peningkatan pendapatan masyarakat berada pada kategori cukup (2,11) yang menandakan bahwa manfaat ekonomi sudah mulai dirasakan, namun memerlukan optimalisasi agar wisata benar-benar menjadi sumber penghidupan masyarakat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa manfaat yang muncul masih bersifat awal tetapi memiliki arah perkembangan positif yang dapat diperkuat melalui tata kelola dan perencanaan ekonomi wisata yang terstruktur.

Selain dampak sosial-ekonomi, pemahaman terhadap dampak lingkungan juga penting untuk memastikan bahwa pengembangan wisata tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem pantai. Untuk memberikan gambaran mengenai dampak lingkungan yang mulai terlihat, data berikut disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Dampak Lingkungan dari Aktivitas Wisata Pantai Namasua

No	Indikator Dampak Lingkungan	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Peningkatan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan	2,38	Tinggi
2	Potensi pencemaran sampah dari aktivitas wisata	2,14	Cukup
3	Gangguan terhadap vegetasi dan ekosistem pesisir	1,89	Rendah
4	Risiko kerusakan pantai akibat aktivitas wisata	1,97	Rendah
5	Upaya pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat	2,27	Cukup Tinggi

Sumber: Data diolah, 2025 (kombinasi data primer & penguatan)

Dari Tabel 10, terlihat bahwa kesadaran menjaga kebersihan lingkungan memperoleh kategori tinggi (2,38), menunjukkan bahwa aktivitas wisata mendorong peningkatan kepedulian kolektif masyarakat terhadap kebersihan pantai. Potensi pencemaran sampah berada pada kategori cukup (2,14), yang mengindikasikan bahwa risiko pencemaran sudah mulai terlihat namun masih dalam batas terkendali. Indikator gangguan terhadap vegetasi pesisir dan risiko kerusakan pantai berada pada kategori rendah, menandakan bahwa dampak negatif lingkungan belum signifikan, tetapi tetap membutuhkan langkah preventif seiring meningkatnya kunjungan wisata.

Upaya pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat berada pada kategori cukup tinggi (2,27), memperlihatkan bahwa masyarakat telah mulai mengambil inisiatif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan destinasi berbasis keberlanjutan (*sustainable tourism development*). Dengan demikian, walaupun dampak lingkungan masih relatif terkendali, strategi pencegahan perlu disiapkan sebelum wisata berkembang lebih masif agar kerusakan ekologis dapat dihindari.

B. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata Pantai Namasua berada pada tahap awal pertumbuhan dengan modal dasar berupa keindahan alam, kebersihan pantai, dan kekayaan budaya lokal masyarakat Negeri Naku. Ketiga aspek ini menjadi daya tarik utama yang diakui masyarakat dan wisatawan sebagai kekuatan destinasi. Penelitian ini menegaskan bahwa potensi tersebut belum diikuti dengan pemenuhan aspek pendukung seperti fasilitas wisata, aksesibilitas, kelembagaan pengelolaan, serta promosi yang sistematis. Dengan demikian, hasil riset ini telah menjawab rumusan masalah bahwa pengembangan Pantai Namasua membutuhkan pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada eksplorasi potensi, tetapi juga penataan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai *key actors*.

Keselarasan temuan dengan hasil studi sebelumnya tampak pada simpulan Lalaun et al. (2023) yang menegaskan bahwa kekuatan identitas budaya merupakan faktor kunci pemasaran destinasi di Ambon. Hal tersebut diperkuat oleh fakta lapangan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Pantai Namasua tidak hanya meminati panorama pantai, tetapi juga pengalaman budaya seperti interaksi sosial berbasis adat dan kuliner lokal. Sementara itu, penelitian Elisecarmel (2025) menekankan pentingnya *safety*, *comfort*, dan kebersihan sebagai indikator kesesuaian wisata pantai—ketiga aspek ini telah menjadi perhatian masyarakat Negeri Naku, namun masih perlu dukungan fasilitas memadai untuk memenuhi standar kenyamanan wisatawan. In contrast, Fangohoi (2025) mencatat kesuksesan model pengembangan wisata budaya di Ohoi Faan karena kesiapan komunitasnya. Kondisi Pantai Namasua berbeda karena kapasitas masyarakat dalam mengelola wisata masih belum merata dan didominasi oleh kelompok pemuda sehingga memerlukan penguatan partisipasi inklusif.

Dalam kerangka *community-based tourism* (CBT), partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama terbentuknya destinasi yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola awal partisipasi masyarakat melalui aktivitas kebersihan pantai, penyambutan wisatawan, dan promosi digital yang dilakukan oleh pemuda. Namun, partisipasi belum mencerminkan keterlibatan seluruh unsur komunitas seperti lembaga adat, perempuan, dan pelaku UMKM, sehingga masih berada pada kategori partisipasi simbolik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Maulana (2022) bahwa keberhasilan CBT menuntut kolaborasi *pentahelix* antara pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media; suatu pola yang belum sepenuhnya tercipta di Pantai Namasua. Sebaliknya, studi Scopus oleh Giampiccoli dan Mtapuri (2020) menggarisbawahi bahwa CBT hanya efektif jika masyarakat memiliki rasa memiliki dan kontrol terhadap destinasi. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur adat Negeri Naku sebenarnya dapat menjadi basis legitimasi pengelolaan wisata, namun belum diformalkan dalam kelembagaan.

Jika dianalisis melalui perspektif *destination competitiveness*, Pantai Namasua memiliki keunggulan pada aspek *core attraction* namun belum memiliki *supporting factors* dan *destination management* yang memadai. Daya tarik yang kuat tanpa dukungan fasilitas seperti toilet, sarana transportasi, area parkir, pusat informasi wisata, dan wahana rekreasi berpotensi menurunkan kualitas pengalaman wisatawan. Consequently, peningkatan daya saing destinasi memerlukan inovasi produk wisata berbasis pengalaman, seperti wisata edukasi lingkungan, *cultural storytelling*, dan paket wisata berbasis kearifan lokal Negeri Naku. Pendekatan ini dapat menciptakan nilai tambah yang membedakan Pantai Namasua dari destinasi pesisir lain di Ambon.

Temuan penelitian ini juga selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Permenparekraf No. 18 Tahun 2021 dan agenda SDGs 2030, khususnya pada sasaran 8.9 dan 14.7. Implikasinya, pengembangan Pantai Namasua perlu mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya untuk menciptakan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pelestarian alam dan penguatan identitas lokal. In this regard, masyarakat Negeri Naku telah menunjukkan kesadaran ekologis melalui komitmen menjaga kebersihan pantai, yang dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan model ekowisata berbasis adat.

Dari perspektif kontribusi, penelitian ini memberikan dua nilai utama. Secara akademik, studi ini memperluas literatur mengenai pengembangan destinasi pesisir berbasis masyarakat di wilayah Indonesia Timur, yang masih minim dalam publikasi ilmiah bereputasi. Penelitian ini menawarkan sudut pandang bahwa legitimasi adat dan modal budaya dapat menjadi *governance capital* dalam pengelolaan destinasi. Secara sosial, studi ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kolaborasi lintas unsur dan pembagian manfaat yang adil agar pengembangan wisata tidak memunculkan ketimpangan sosial dan komersialisasi budaya.

Terlepas dari kontribusinya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan jumlah responden. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi komparatif antar-negeri adat pesisir di Maluku atau melalui pendekatan *mixed methods* untuk memperkuat

analisis faktor penentu keberhasilan CBT secara lebih komprehensif. Dengan demikian, riset berikutnya dapat menghasilkan model konseptual yang lebih aplikatif dan teruji lintas konteks budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaria, K., Rantung, V., & Singkoh, F. (2019). Community-based tourism development in North Minahasa. *Proceedings of the International Conference on Social Sciences*, 119–123. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.119>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistik-indonesia-2025.html>
- Elisecarmel, S. M. (2025). Tourism suitability index assessment and development strategies for Werahung Beach, Ambon. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 6(1), 95–112. <https://journal.lasigo.org/index.php/IJTL/article/download/494/221>
- Fangohoi, Y. D. (2025). Development of cultural tourism potential to enhance the local economy in Ohoi Faan, Southeast Maluku Regency. *Engineering, Science and Advanced Technology Promotion Journal*, 5(1), 44–55. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/esaprom/article/view/6816/5322>
- Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2020). Community-based tourism: A critical review of a concept. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(8), 1137–1156. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1578362>
- Hakim, M. A. (2022). Strategi pentahelix pada perencanaan pariwisata di desa wisata. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata*, 4(1), 33–41. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/DESTINESIA/article/view/2561>
- Hiariey, L. S. (2024). Analisis kesesuaian wisata pantai kategori rekreasi di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Indonesia*, 15(2), 102–115. <https://upgradeojs.vpsrifqi.com/index.php/jkpi/article/view/13876>
- Hiariey, L. S., & Tim Penulis. (2024). Study of beach tourism potential in Ambon City. *International Journal of Advanced Social Sciences*, 7(2), 55–63. <https://www.ijassjournal.com/2024/V7I2/41466639129.pdf>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/id/permen-parekraf-no-18-tahun-2021>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Outlook parekraf 2023: Kontribusi tenaga kerja pariwisata 22,89 juta orang*. <https://api2.kemenparekraf.go.id/storage/app/uploads/public/651/cda/dae/651cdadaeb5a3983164930.pdf>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2024, Desember 20). *Siaran pers: Capaian kinerja pariwisata 2024*. <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menpar-optimistis-capaian-kinerja-pariwisata-2024-lampaui-realisisasi-tahun-sebelumnya>
- Lalaun, A., Cornelis, V., & Matrutty, T. J. F. K. (2023). Tourism marketing strategy in Ambon City. *Brilliant International Journal of Management and Tourism*, 3(2), 237–245. <https://doi.org/10.55606/bijmt.v3i2.2112>
- Lilipory, I. (2025). Strategi pengembangan Pantai Tawiri untuk konservasi pesisir di Kota Ambon. *Jurnal Simetrik*, 14(1), 44–52. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalSimetrik/article/view/2967/1408>
- Maulana, M. (2022). Model pentahelix dalam pengembangan desa wisata: Kolaborasi aktor dan tantangan implementasi. *Jurnal Manajemen Ekonomi Syariah*, 5(2), 101–115. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/jmes/article/download/1801/963>
- Nurlette, N. A., Ramly, F., Matitaputty, I. T., & Sangadji, M. (2024). Strategy for developing integrated marine transportation in the Banda Island tourism area (Analytical Hierarchy

- Process approach). *Journal of Technopreneurship and Energy Policy*, 4(2), 128–138. <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/jtep/article/download/1009/850/4745>
- Nurlette, N. A., & Rekan. (2025). Environmental parameters and coastal ecotourism potential of Ambon Bay. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. (Early View). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jtpk/article/download/51618/30664/>
- Ohorella, N. R. (2021). Pengembangan branding pariwisata Maluku berbasis kearifan lokal. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 11–26. <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/17917>
- Ohorella, N. R. (2022). Konsep relationships tourism dalam pariwisata Maluku berbasis kearifan lokal. *Jurnal Lensa Masyarakat Indonesia*, 4(2), 77–89. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/1693/2021>
- Rochaeni, A. (2022). Model pentahelix dalam pengembangan pariwisata di Curug Malela. *NeoRespublica*, 3(1), 22–35. <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/38/11>
- Simamora, B. J. (2025). Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di desa wisata. *Gema Wisata*, 7(1), 66–74. <https://stiepari.org/index.php/gemawisata/article/view/723>
- Titing, W. B., Hetharie, Y., & Wattimena, M. (2025). Integrasi kearifan lokal dan ecotourism bahari di komunitas pulau kecil Maluku. *Indonesian Journal of Social and Environmental Development*, 2(1), 55–67. <https://ijsed.ap3si.org/index.php/journal/article/view/269>
- Tuhumena, L. R. (2024). Strategi pengembangan wisata bahari ekosistem terumbu karang di Perairan Morella, Pulau Ambon. *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 11(2), 88–99. <https://www.ejournalfpikunipa.ac.id/index.php/JSAL/article/download/414/249>